

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT  
PERCERAIAN DI KECAMATAN KALIDAWIR TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :  
**INDAH PRASADA HAPSARI**  
NPM. 0671010046

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2010**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Indah Prasada Hapsari  
NPM : 0671010046  
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 01 Oktober 1987  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT  
PERCERAIAN DI KECAMATAN KALIDAWIR TULUNGAGUNG**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Kantor Urusan Agama tentang perkawinan. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah faktor pendorong yang kuat dalam perkawinan usia muda yang terjadi Kecamatan Kalidawir yaitu hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak semua perkawinan di usia muda mengalami perceraian.

***Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian.***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang mana dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan, walaupun demikian masih banyak anggota masyarakat kita yang kurang

---

<sup>1</sup>Prof.R.Subekti, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 449.

memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 16 tahun.<sup>2</sup> Namun dalam ketentuan ayat(2) UU Perkawinan menyatakan dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>3</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal 540.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 540.

dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Secara umum tidak seorang pun ada yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seiya dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerenggangan-kerenggangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan.

Tujuan perkawinan sering tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan dalam sebuah

perkawinan. Dengan demikian terjadinya perkawinan diharapkan dapat memberikan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua.

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya yang berakhir pada perceraian. Masalah lain yang sering timbul misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) atau tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Tetapi sebagian besar dari mereka yang melakukan perkawinan usia muda khususnya di Kecamatan Kalidawir, hubungan rumahtangga mereka langgeng. Hal ini dikarenakan mereka yang melakukan perkawinan usia muda tersebut taat pada kedua orangtua, taat pada agamanya, dan taat terhadap adat, sehingga mereka dapat dengan mudah menyatukan suatu perbedaan diantara mereka.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun social ekonomi.

Sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul “ *Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Kalidawir Tulungagung* “, akan di batasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Kec. Kalidawir ?
2. Bagaimana dampak perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Kec. Kalidawir ?
3. Bagaimana peran dari Kantor Urusan Agama Kec. Kalidawir dalam menyikapi perkawinan usia muda?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang terjadi di Kecamatan Kalidawir.

2. Mengetahui bagaimana dampak perkawinan usia muda yang terjadi di Kecamatan Kalidawir terhadap tingkat perceraian.
3. Mengetahui peran dari Kantor Urusan Agama Kec. Kalidawir dalam menyikapi perkawinan usia muda.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai dampak perkawinan di usia muda terhadap tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang UU perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memberikan pengetahuan kepada pasangan suami-istri mengenai seluk-beluk kehidupan berumah-tangga

#### **1.5. Kajian Pustaka**

##### **1.5.1. Perkawinan Usia Muda**

Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang



tua. Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-Undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia perkawinan usia muda berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda, rata-rata usianya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%.<sup>4</sup> Di Tulungagung sendiri khususnya di desa Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda berjumlah lebih dari 15 orang.

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah usia 21-25 tahun sedangkan laki-laki usia 25-28 tahun, karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik sudah mulai matang. Seorang laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga

---

<sup>4</sup><http://pdfmachine.com//30-05-2010//02.44pm>.

mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.<sup>5</sup>

Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi adanya beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur. Faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan perkawinan usia muda yaitu antara lain keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat (kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya di usia muda hanya karena mengikuti kebiasaan adat saja). Selain fktor di atas, ada beberapa factor lain yang mendorong terjadinya perkawinan di usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, yaitu:

---

<sup>5</sup><http://pdfmachine.com//30-05-2010//02.47pm>.

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena kehidupan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orangtua

Orangtua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

### 1.5.2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu hakekat manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Keinginan tadi antara lain juga berwujud sebagai suatu hasrat untuk mengetahui tentang kaedah-kaedah yang secara sadar maupun tidak sadar menjadi pengatur dari perikelakuan sehari-hari dari manusia. Bahwa manusia tidak selalu menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-harinya dia berperikelakuan menurut suatu pola tertentu, adalah karena sejak dilahirkan dia sudah berada di tengah-tengah suatu pola tertentu, melalui proses imitasi atau karena pendidikan yang diperolehnya. Pola tersebut pada hakekatnya merupakan suatu struktur daripada kaedah-kaedah untuk hidup. Struktur kaedah-kaedah yang merupakan patokan untuk berperikelakuan, sebenarnya timbul oleh karena pada hakekatnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup secara wajar atau pantas.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau sebagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit untuk dapat membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus-menerus dengan sendirinya akan

---

<sup>6</sup>Prof. Dr. Mr. Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal 13.

mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaedah-kaedah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Kecuali daripada itu, maka juga diperlukan kaedah-kaedah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang apabila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi apabila kaedah tersebut dilanggar. Hal ini semua tercakup didalam Hukum Adat yang terutama berisikan perintah, larangan dan kebolehan.

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut masing-masing tradisi.

Perbedaan kelamin menyebabkan terjadinya hidup bersama-sama antara seorang pria dengan seorang wanita dan itulah yang menjadi sebab-musabab kelangsungan hidup manusia. Hal itu menjadi sumber daripada kehidupan keluarga dan perkembangan lebih lanjut merupakan titik pangkal daripada tata masyarakat. Perkawinan itu merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah, harta perkawinan marital, kekuasaan marital, kekuasaan orangtua dan hukum waris.

Menurut etnologi, perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si istri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak.<sup>7</sup> Menurut hukum adat, suatu usia yang umum di Indonesia adalah usia lima belas (15) tahun dikatakan sudah dewasa.<sup>8</sup>

Perkawinan usia muda menurut hukum adat adalah sah apabila adanya izin dari kedua orangtua kedua belah pihak, walaupun kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut usianya masih sangat muda dan belum matang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam suatu perkawinan.

### 1.5.3. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mengesahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal 23.

<sup>8</sup>Prof. R. Subekti, SH., *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1983, hal 44.

<sup>9</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal 27.

Nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai pria dan wanita, yaitu:

- a. Telah baliq dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

Nikah bagi yang bersangkutan, dalam hal ini suami-istri, juga bagi masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting, karena menentukan mulai dari saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya. Dalam pembagian garis-garis besar kerangka hukum islam, perkawinan itu termasuk satu bagian dari bab mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu hubungan antara orang dengan orang. Dalam pengertian lain perkawinan termasuk satu bagian dari bab

mu'amalat mengenai hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan.<sup>10</sup>

Tujuan nikah adalah mengesahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lain. Secara terperinci tujuan nikah tersebut adalah :

a. Untuk memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia itu mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Sudah menjadi kodrat manusia, bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Keturunan akan menjadi belahan jiwa. Suami istri yang hidup sebagai keluarga tanpa anak akan merasa sepi dan hampa.<sup>11</sup>

b. Untuk memenuhi naluri sebagai manusia

Adalah sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan saling mengandung daya tarik antara yang satu dan yang lain, yaitu daya tarik birahi

---

<sup>10</sup> **Nadimah Tanjung**, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun, h. 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 31.



atau seksual. Dalam Al Qur'an, Tuhan berfirman : “ Manusia dihiasi dengan nafsu birahi kepada wanita-wanita “. <sup>12</sup>

c. Membentuk dan mengatur rumah tangga

Rumah tangga merupakan landasan pertama masyarakat yang besar, di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh yang menjalin suami istri, yang tadinya tidak ada ikatan, baik pertalian darah maupun pertalian keturunan, menjadi satu persekutuan hidup yang begitu kokoh. Unsur yang mengikat tali perhubungan tersebut ialah kecintaan dan kasih sayang, sebagaimana diungkapkan di dalam Qur'an : “ Ia (Tuhan) jadikan bagi kamu jodoh-jodoh (pasangan) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu mendapat ketenteraman. Ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya itu menjadi pertanda bagi orang yang suka berfikir”. <sup>13</sup> Dengan kecintaan dan kasih sayang tersebut terbentuklah dan teraturlah rumah tangga, yang merupakan landasan suatu masyarakat yang besar.

Menurut ketentuan hukum islam, rukun dan syarat pernikahan itu terdiri dari 5 hal yang harus dipenuhi :

---

<sup>12</sup> Qur'an, Surat Ali Imran Ayat 14.

<sup>13</sup> Qur'an, Surat Ar- Rum Ayat 21.

1. Ada wali

Dalam hal ini yang berhak menjadi wali yaitu :

- a. Ayah
- b. Ayah dari ayah, jika ayah dari ayah tidak ada, barulah ayah dari kakek dan seterusnya ke atas
- c. Saudara kandung pria, kalau terdiri dari beberapa orang, maka yang utama bertindak sebagai wali ialah yang lebih mengerti hukum agama atau yang tertua. Bilamana saudara kandung pria yang seibu-seayah tidak ada, maka barulah saudara kandung pria yang seayah
- d. Anak pria dari saudara pria yang seibu-seayah. Bila ini tidak ada, baru yang seayah
- e. Saudara pria dari ayah yang seibu-seayah, kalau ini tidak ada, baru yang seayah
- f. Anak pria dari paman, didahulukan yang seibu-seayah, baru yang seayah
- g. Paman dari ayah (adik kakek). Juga didahulukan yang seibu-seayah, baru kalau tidak ada, yang seayah
- h. Anak pria dari yang disebutkan pada sub g

- i. Paman dari kakek; anak pria dari yang disebutkan dalam sub h

Syarat-syarat menjadi wali yaitu :

- a. Orang mukallaf / baliq, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadist Nabi : “Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara; dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.”<sup>14</sup>
- b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga orang muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah: Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.<sup>15</sup>
- c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.
- d. Laki-laki

---

<sup>14</sup> HR. Bukhari Muslimin, *Koleksi Hadist Bukhori dan Muslim*, Yayasan Amanah, Tuban, Jawa Timur, 1997, hal 206.

<sup>15</sup> Qur'an Ali Imran Ayat 28.

e. Adil

2. Ada ridho (kesukaan) dari pihak calon istri

Alasan adanya keharusan ini terdapat di dalam hadist yang berbunyi : “Seorang janda atau perempuan yang telah bercerai tidak boleh dikawinkan sampai diperoleh pernyataan (persetujuan) daripadanya; seorang gadis juga tidak boleh dikawinkan sebelum ada persetujuan daripadanya.<sup>16</sup>

3. Ada saksi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, yaitu :

- a. Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dalam hal persaksian.
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>16</sup> HR. Bukhari, *Koleksi Hadist Bukhori dan Muslim*, Yayasan Amanah, Tuban, Jawa Timur, 1997, hal 206.

- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.
- e. Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini didasarkan pada firman Allah : “ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya “. <sup>17</sup>

#### 4. Ada ijab dan Kabul

Bahwa perkawinan itu harus dimulai dengan akad nikah. Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab adalah penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada pengantin pria dan Kabul adalah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria. <sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Al Qur'an, Surat Al Baqarah Ayat 28.

<sup>18</sup> **R. Soetojo Prawirohamidjojo**, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal 32.

Dengan melaksanakan ijab-kabul ini berarti, bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan oleh agama, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan kepada hakim.<sup>19</sup>

#### 5. Ada mahar atau maskawin

Adalah suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukan walinya. Mahar ini merupakan suatu ketentuan yang mengandung unsur sosiologis bagi kedudukan wanita dalam masyarakat, sebaliknya bagi kaum pria, mahar adalah sebagai pengakuan terhadap kebebasan kaum wanita untuk mempunyai dan mengurus hak miliknya sendiri. Maskawin tersebut suatu pemberian, baik berupa uang atau barang ataupun dalam bentuk jasa, yang diserahkan ketika dilangsungkan upacara nikah dan biasanya disebutkan dalam lafal nikah (ijab dan Kabul).

---

<sup>19</sup> **Ny. Soemiyati, S.H.**, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 53.

Sedangkan sebagai misal dari bentuk maskawin yang disebut terakhir adalah, bahwa mempelai pria akan mengajarkan sembahyang, membaca Qur'an dan sebagainya. Maskawin yang berbentuk uang dapat dihutang oleh suaminya dan harus dibayar semasa hidupnya. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi, maka nikah tersebut dianggap tidak sah.<sup>20</sup>

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, di dalam Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Untuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. [ Pasal 7 ayat (2) ].

Ketentuan batas umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut di atas adalah sudah tepat sekali kalau ditinjau dari tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tenteram. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang

---

<sup>20</sup>Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1987, h. 165.

melaksanakan perkawinan itu belum cukup umur dan kecakapannya belum sempurna.

Dalam islam dikatakan dewasa jika mereka sudah mukallaf/baliq, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perkawinan usia muda menurut islam adalah perkawinan yang usia keduanya masih sangat muda, namun perkawinan tersebut dapat dilaksanakan jika kedua calon mempelai mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan agama dan izin dari kedua orangtuanya. Selain itu juga adanya kesukarelaan antara kedua calon mempelai.

#### **1.5.4. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan



yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang. Bila definisi tersebut di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya<sup>21</sup> :

#### 1. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain, hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

---

<sup>21</sup>**R. Soetojo Prawirohamidjojo**, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal 38.

## 2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita.

## 3. Sebagai suami istri

Ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat-syarat eksternnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern adalah yang menyangkut formalitas pelaksanaan perkawinan.

Syarat-syarat intern yaitu antara lain :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.

- b. Harus mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Bagi pria sudah harus mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.
- e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinan karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat ektern yaitu antara lain :

- a. Laporan
- b. Pengumuman
- c. Pencegahan
- d. Pelaksanaan

#### 4. Membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selamanya, kecuali cerai karena kematian.

#### 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertama ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan yaitu:

### **Pasal 6**

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **Pasal 7**

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

#### **Pasal 10**

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### **Pasal 11**

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah oleh pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditanda-tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda-tangani juga oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang mebhgadhiri perkawinan menurut agama Islam, ditanda-tangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penanda-tanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Asas-asas perkawinan menurut Hilmam Hadikusuma, S.H.,  
 asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Prof. Dr. Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal 20

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan keluarga yang rukun, damai , bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaannya, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orangtua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Asas-asas perkawinan menurut UU Perkawinan adalah:

1. Asas suka rela

Menurut Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.

## 2. Partisipan keluarga

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orangtua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan.

## 3. Perceraian dipersulit

Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam Pasal 39 dan 41 UU Perkawinan, disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai dengan mudahnya dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan, baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya (bagi yang sudah mempunyai anak).

## 4. Asas Monogami

Penegasan asas monogami ini terdapat pada Pasal 27 yang berbunyi:

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami”.

Dengan demikian perkawinan menurut UU mempunyai asas monogami, namun dengan demikian tidak menutup kemungkinan



bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

#### 5. Kematangan calon suami

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas umur suatu perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita, maka dengan demikian perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia.

#### 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

### **1.5.5. Perceraian**

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan

pembatalan, baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (suami/istri) meninggalkan keluarga.

Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami-istri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami-istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam Hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38, sebagai berikut :

- a. Karena kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan di sini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak

menimbulkan masalah. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi, baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian bagi mereka yang beragama islam di Pengadilan Agama dan bagi mereka yang beragama selain islam di Pengadilan Negeri. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Adapun hal-hal yang dapat dipakai

sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, disamping adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan

perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk selamanya. Selain alasan diatas ada juga alasan yang sering terjadi, yaitu alasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan.

Tata cara perceraian dalam UU Perkawinan, ketentuannya diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 36. Perceraian ada 2 (dua) macam, yaitu :

#### 1. Cerai Talak

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu.
- b. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.

- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan mengadakan siding untuk menyaksikan perceraian itu.
- d. Siding Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam siding tersebut.
- e. Kemudian Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk diadakan pencatatan perceraian.
- f. Percerain itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

## 2. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu

putusan Pengadilan.<sup>23</sup> Tata cara perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan 36, sebagai berikut :

a. Pengajuan gugatan

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau tergugat berkedianan di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- 3) Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

b. Pemanggilan

- 1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan

---

<sup>23</sup>K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal 40.

dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- 2) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- 3) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di buka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- 4) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media yang lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 5) Apabila tergugat berkediaman di luar negeri, pemanggilannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.



### 3. Persidangan

- 1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya berkediaman di luar negeri, persidangan tetap dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- 2) Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- 3) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- 4) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

### 4. Perdamaian

- 1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.

- 2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh pengugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- 3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

#### 5. Putusan

- 1) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- 3) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.<sup>24</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “ *Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Tulungagung*”. Analisis dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis.

### 1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum

---

<sup>24</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 30.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari :
  - a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana terdiri dari:
  - a. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. (R.SoetojoPraworohamidjojo, Airlangga University Press, Surabaya, 2006).
  - b. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. (Soemiyati, Liberty, Yogyakarta, 2007).

- c. Pokok-pokok Hukum Adat. ( Prof. Dr. Mr. Soekanto, Alumni, Bandung, 1981).
  - d. Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. (Prof. Subekti, Alumni, Bandung, 1983).
  - e. Metode Penelitian Hukum. (Zainuddin Ali, Sinar Grafika, Jakarta, 2009).
3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari :
- a. Kamus hukum
  - b. Kamus bahasa Indonesia

#### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data**

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, dimana data lapangan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan staf atau pegawai Kantor Urusan Agama dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Dan dengan kajian pustaka yaitu dengan membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas. Dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kalidawir dan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2010. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei minggu terakhir. Tahap persiapan penelitian ini meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai minggu terakhir bulan Mei sampai bulan Juli minggu pertengahan, meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Skripsi dengan judul **PERKAWINAN USIA MUDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN KALIDAWIR TULUNGAGUNG**, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (Lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Bab I, adalah merupakan Pendahuluan dan di dalamnya menguraikan tentang:

I.1. Latar Belakang Masalah

I.2. Rumusan Masalah

I.3. Tujuan Penelitian

I.4. Manfaat Penelitian

I.5. Kajian Pustaka

I.6. Metodologi Penelitian

I.7. Sistematika Penulisan

Bab II, merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada pada bab I, yaitu :

II.1. Hasil Penelitian Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan  
Kalidawir Tulungagung

II.2. Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan  
Kalidawir Tulungagung

Bab III, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang  
kedua yaitu :

III.1. Hasil Penelitian Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap  
Tingkat Perceraian

III.2. Dampak Perkawinan Usia Muda

III.3. Dampak Perkawinan Usia Muda dan dampaknya terhadap  
tingkat perceraian

Bab IV, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang  
ketiga yaitu :

IV.1. Hasil Penelitian

IV.2. Peran Kantor Urusan Agama dalam menyikapi perkawinan  
usia muda



Bab V, mengakhiri semua pembahasan dan analisa dari keseluruhan bab sebelumnya (dari bab I, II, III, IV) berisi :

V.1. Kesimpulan

V.2. Saran